

**AKIBAT HUKUM PERSYARATAN PENETAPAN EKSEKUTOR DI  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TERHADAP KEPASTIAN  
EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL**

**INTISARI**

Oleh :

Johanes Marto<sup>1</sup>, Herliana<sup>2</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji pengaruh penetapan arbitrase terhadap kepastian hukum pelaksanaan arbitrase dan akibat hukum putusan arbitrase yang tidak mendapatkan eksekutor.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data pada penelitian ini adalah menggunakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Undang-Undang, jurnal hukum dan hasil karya hukum yang terkait dengan materi penelitian. Cara pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Melalui rangkaian tersebut Penulis berharap dapat menggambarkan secara jelas pengaruh penetapan eksekutor terhadap kepastian hukum pelaksanaan arbitrase dan akibat hukumnya jika putusan arbitrase tidak mendapatkan eksekutor.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga meneliti putusan Mahkamah Agung dengan nomor: No.46/Pdt.G/1999 tanggal 9 Desember 1999 antara *Bankers Trust Company* dan *Bankers Trust International PLC* (BT) melawan PT Mayora Indah Tbk (Mayora) dan putusan Mahkamah Agung dengan nomor: 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 yang menolak permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang diajukan oleh Grup Astro. Pada kedua putusan tersebut tidak mendapatkan eksekutor karena bertentangan dengan ketertiban umum. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa apabila suatu putusan arbitrase nasional tidak mendapatkan eksekutor maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusi di negara termohon dan pihak pemohon dapat melakukan permohonan di negara lain yang terdapat asset termohon.

Kata Kunci : *eksekutor, kepastian hukum, arbitrase nasional*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi S2 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup> Dosen Program Studi S2 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

**LEGAL CONSEQUENCES REGARDING EXECUTIONER AWARD  
IN CENTRAL JAKARTA DISTRICT COURT TOWARDS  
THE CERTAINTY OF THE EXECUTION OF INTERNATIONAL ARBITRAL AWARD**

**ABSTRACT**

By

Johanes Marto<sup>3</sup>, Herliana<sup>4</sup>

This study aims to understand and examine the effect of arbitration decisions on legal certainty in the implementation of arbitration and the legal consequences of arbitral awards that do not get an executive order.

This study uses a normative research method that is descriptive in nature with a statutory approach and a case approach. The type of data in this study is to use data obtained through literature studies on laws, legal journals and legal works related to research material. The data collection method used is a literature study. Through this series of research, the author hopes to be able to clearly describe the influence of the executory determination on the legal certainty of the implementation of the arbitration and the legal consequences if the arbitral award was not in favor of executory award.

In conducting this research, the writer also carries out extensive researches regarding Supreme Court Decision Number: 46/Pdt.G/1999 tanggal 9 Desember 1999 by and between *Bankers Trust Company* and *Bankers Trust International PLC* (BT) against PT Mayora Indah Tbk (Mayora) and also Supreme Court Decision Number: 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016. Those two decisions reject the application for enforcement of the international arbitral award submitted by the Astro Group. In both of these decisions did not obtain execution award because it is contrary to public order. In this study it was concluded that if a national arbitral award is not granted with an execution award then the decision cannot be executed in the country of the respondent and the applicant can make an application in another country where the assets of the respondent are found

Keyword : *execuator, legal certainty, national arbitration*

---

<sup>3</sup> Student, Master of Law Program Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

<sup>4</sup> Lecturer in Master of Law Program Faculty of Law Universitas Gadjah Mada Yogyakarta